

## ABSTRAK

Robert Antonius (1010612005), Analisis Yuridis Tentang Hak Subrogasi Dalam Asuransi Pengangkutan Barang di Indonesia ((Studi Kasus : Klaim Subrogasi dari PT Asuransi AXA Indonesia kepada PT Samudera Shipping Service), Dibawah bimbingan Heru Suyanto, SH, MH.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak subrogasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta menemukan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, serta sifat penelitian studi kasus karena menggunakan kasus nyata yang telah terjadi. Sumber data yang digunakan terutama bahan hukum primer dan sekunder, dokumen dan hasil wawancara, untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang berdasarkan KUHD, tetap dengan memperhatikan pengaturan hukum tentang asuransi secara umum, serta pengaturan hukum tentang pelayaran baik secara nasional maupun yang berlaku sebagai konvensi pelayaran internasional, sedangkan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang berdasarkan KUHD membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian klaim asuransi oleh penanggung, proses penilaian kerugian akibat evenement oleh perusahaan penilai kerugian serta kecepatan dan ketepatan pembayaran klaim asuransi oleh penanggung kepada tertanggung serta adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hasil analisis selanjutnya memperlihatkan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang masing-masingnya adalah 1) tidak adanya bukti perikatan dasar antara tertanggung dengan pihak ketiga yang merugikan kepentingan tertanggung, 2) adanya kekeliruan dalam pembayaran klaim asuransi dari penanggung terhadap tertanggung, 3) tidak adanya ketulusan dan itikad baik dari tertanggung agar hak subrogasi dapat dilaksanakan, 4) kurangnya kejujuran dari para pihak terutama tertanggung serta memanfaatkan secara keliru adanya kondisi yang ada termasuk menerima ganti rugi melebihi dari kerugian yang dideritanya, 5) kemungkinan adanya kompromi atau pembebasan kewajiban pihak ketiga oleh tertanggung serta 6) kemungkinan adanya perbedaan antara harga nilai pasti barang sesuai dengan yang disebutkan dalam polis dengan harga nilai barang sesuai lokasi terjadinya kerugian pada tertanggung.

Kata kunci: *asuransi ; subrogasi ; doktrin asuransi*

## **ABSTRACT**

*Robert Antonius (1010612005), Analysis of Juridical About the Right of Subrogation in Marine Insurance Goods In Indonesia (Case Study : Subrogation Claim from PT Asuransi AXA Indonesia to PT Samudera Shipping Service), Under the Guidance Heru Suyanto, SH, MH.*

*The purpose of this study was to determine the arrangement and implementation of the right of subrogation under the Code of Commercial Law and find weaknesses in the implementation of the right of subrogation in insurance transporting goods in Indonesia. The method used is a method of legal research with this type of research is a method of normative-empirical legal research, as well as the nature of a case study because it uses real cases that have occurred. Source data used mainly primary and secondary legal materials, documents and interviews, for further analysis. The analysis showed that the regulation of insurance subrogation rights in the transport of goods by Commercial code, fixed with due regard to the legal regulation of insurance in general, as well as the legal regulation of shipping both the national and conventions in force as international shipping, while the implementation of the insurance subrogation rights in the carriage of goods by KUHD require speed and accuracy in the process of settlement of the insurance claim by the insurer, the assessment process even event losses by the appraiser losses as well as speed and accuracy of insurance claims payments by the insurer to the insured as well as their awareness of the rights and obligations of each party. The results of further analysis showed that weaknesses in the implementation of insurance subrogation rights in the transport of goods each is 1) not Adalah evidence base of the engagement between the insured with third parties against the interests of insured, 2) the presence of errors in the payment of insurance claims from the insurer to the insured, 3) the lack of sincerity and good faith of the insured that the right of subrogation can be implemented, 4) lack of honesty of the parties, especially the insured as well as utilize erroneously their existing conditions including receiving compensation in excess of the losses sustained, 5) the possibility of compromise or liberation party liability third by the insured and 6) the possibility of the difference between the price of the cargo in accordance with a definite value stated in the policy with the price of the cargo value corresponding to the location of the occurrence of the insured loss.*

*Keywords: insurance; subrogation doctrine insurance*